

## PEMERINTAH KOTA SEMARANG GENJOT SEKOLAH SWASTA GRATIS UNTUK PENDIDIKAN MERATA



Sumber gambar: *cnnindonesia*

**Jakarta, CNN Indonesia** -- Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk mewujudkan generasi emas 2045 dengan menyiapkan 121 sekolah swasta gratis. Program ini ditujukan untuk menampung anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, serta menjawab permasalahan masyarakat terkait jarak atau zonasi tempat tinggal dengan sekolah negeri.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengatakan bahwa program sekolah swasta gratis ini merupakan solusi untuk pemerataan pendidikan di Kota Semarang. Menurutnya, program ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kita support sekolah swasta agar bisa sejajar dengan sekolah negeri. Karena orang biasanya memilih sekolah negeri," ujar Mbak Ita, sapaan akrab wali kota, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/10). Menurutnya, jarak sekolah negeri yang jauh menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendidikan di Kota Semarang. Pemkot Semarang telah berupaya untuk mendapatkan izin mendirikan sekolah negeri baru, namun prosesnya cukup panjang. "Jadi paling mudah ya kita berikan support kepada sekolah swasta," imbuh dia.

Mbak Ita memastikan akan terus mengupayakan sekolah swasta gratis agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dan kompetensi untuk bekal di masa depan. Apalagi hal ini juga untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045. "Apalagi tahun 2045 kita akan bentuk generasi emas, bahkan 2025 sudah mulai berproses. Sehingga kita harus bisa merencanakan agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan terbaik," papar dia.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Bambang Pramusinto menjelaskan, sampai saat ini sudah ada 121 sekolah swasta gratis yang dibiayai oleh Pemkot Semarang. Rinciannya PAUD/TK sebanyak 32, SD sebanyak 47, dan SMP sebanyak 42. Menurutnya, program sekolah swasta gratis juga menjawab permasalahan masyarakat terkait jarak atau zonasi tempat tinggal dengan sekolah negeri. Ke depan tak menutup kemungkinan sekolah swasta gratis di Kota Semarang akan bertambah.

"Kita akan melakukan kajian jika perlu menambah sekolah swasta gratis maka akan kita tambah. Anggarannya sesuai jumlah murid yang dilayani oleh sekolah swasta. Jadi prinsipnya bagaimana jika ada pelajar yang sekolah di swasta tersebut bisa gratis," paparnya. Dia menjabarkan, ada beberapa indikator sekolah swasta untuk bisa memberikan pendidikan gratis ke muridnya. Di antaranya adalah sekolah swasta melakukan asesmen untuk dipertimbangkan.

Namun, Bambang menekankan, yang terpenting adalah para murid atau anak didik harus memiliki komitmen untuk belajar dan menaati peraturan yang ditetapkan. "Jika sudah punya komitmen lalu kami berikan bantuan sekolah swasta gratis, maka benar-benar tidak dipungut biaya ke anak-anak. Lalu pemetaan, jadi titik mana saja yang kira-kira bisa support sekolah swasta gratis. Karena di beberapa kecamatan sekolah negerinya kan langka, maka kita komunikasikan dengan pihak sekolah untuk mendapatkan fasilitas sekolah swasta gratis," pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231027171321-25-1016845/pemkot-semarang-genjot-sekolah-swasta-gratis-untuk-pendidikan-merata>, Pemkot Semarang Genjot Sekolah Swasta Gratis untuk Pendidikan Merata, tanggal 05 Juni 2024
2. <https://news.detik.com/berita/d-7005216/pemkot-semarang-genjot-pemerataan-pendidikan-lewat-sekolah-swasta-gratis>, Pemkot Semarang Genjot Pemerataan Pendidikan Lewat Sekolah Swasta Gratis, tanggal 05 Juni 2024

#### **Catatan Berita:**

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
  - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
  - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

## 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

### Pasal 1:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

### Pasal 40:

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 46:

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan Pendidikan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47:

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48:

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49:

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

Pasal 14 Ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-- undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Pasal 15 Ayat (1):

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan:

Pasal 80:

- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.

- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Menteri-menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (4) Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Mekanisme pendanaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81:

- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 82:

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83:

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.
  - (2) Hibah dari Pemerintah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (3) Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.